

Ringkasan Tesis Bab I-III

Judul Tesis: **Kiprah Politik Umat Katolik: Studi Komparatif antara Partai Katolik dan Partai Katolik Demokrat**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan jawaban terhadap metode penelitian kuantitatif yang bersandar pada paradigma positivisme. Untuk membahas data yang didapatkan peneliti menggunakan analisis naratif sebagai salah satu bagian konstruktivisme yang melihat bahwa kehidupan sosial berbeda dengan dunia fisik yang sangat matematis. Analisis naratif merupakan perluasan dari hermeneutik yang mendefinisikan teks secara lebih luas, yaitu wawancara mendalam, transkrip, biografi, sejarah, maupun nonfiksi kreatif. Analisis ini dipengaruhi oleh fenomenologi yang menekankan pada pemahaman mengenai pengalaman serta persepsinya. Kebanyakan metodologi analisis naratif banyak memberikan penekanan pada alam intepretasi.

Dalam analisis naratif, kita mengambil keseluruhan teks sebagai objek analisis, yang berfokus pada struktur kisah atau narasi, termasuk dalam pemberitaan (media faktual). Hal ini lantaran media faktual juga menciptakan narasi. Struktur berita dibangun di seputar cerita dan unsur-unsur cerita disusun sebagaimana peristiwa yang terjadi. Narasi adalah sebuah komponen yang selalu dikandung setiap media dan bentuk kultural apa pun. Dorongan untuk menarasikan muncul dalam tanggapan-tanggapan manusia terhadap dunia, dan kita tidak bisa menghindarinya.

Riset tambahan khususnya pustaka terhadap dokumen partai maupun pemberitaan di media massa terutama elektronik dilakukan terhadap gerakan politik beridentitas Kristen di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan gerakan politik beridentitas Katolik pada Pemilihan Umum 1999. Hasilnya cukup menarik, jika gerakan politik Katolik tertatih menuju Senayan, sebaliknya Kristen dalam hal ini Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) justru betul-betul tenggelam. Sementara partai Kristen campuran yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) justru berhasil menuai suara sehingga menapak Senayan bahkan cukup mewarnai sejumlah debat politik hingga 2004.

Peneliting PKD maupun PDKB ditakdirkan mati muda sehingga gagal melangkah ke Pemilu 2004. Kiprah partai beridentitas Kristen kemudian dilanjutkan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mengejutkan dan cukup memiliki kiprah yang fenomenal. Meski demikian, tentu saja peneliti mengakui adanya kekurangan dalam kedalaman buku sederhana ini disebabkan keterbatasan waktu yang peneliti miliki untuk melakukan verifikasi terhadap aktor-aktor politik

partai berbaju Kristen yang ada.

Fenomena politik aliran atau 'political cleavage' selalu menarik. Dalam ilmu politik, politik aliran mendasarkan diri pada faktor struktural seperti kelas, usia, gender dan agama, hal ini merupakan alat prediksi bagi pilihan pemilih. Diantara faktor-faktor struktural tersebut, aspek agama atau religiusitas merupakan fenomena menarik dalam kehidupan demokrasi, hal ini selaras dengan keyakinan dua sosiolog besar dunia, Max Weber maupun Emile Durkheim. Keduanya melihat bahwa religiusitas merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan sosial.

Pendek kata, keagamaan adalah tarikan kuat terhadap ketertarikan dan keterlibatan politik. Pasca keruntuhan Orde Baru, tak kurang dari delapan belas partai serentak mengumumkan bahwa azas partai mereka adalah berdasarkan agama masing-masing. Peneliti melihat singkatnya waktu dan alasan kepraktisan, munculnya identitas partai berdasarkan keagamaan bukan karena fanatisme ideologi. Justru munculnya partai-partai beridentitas agama pada 1999, lebih disebabkan romantisme dan praktis. Romantisme terhadap Pemilu pertama tahun 1955 yang selalu disebut-sebut demokratis dan praktis karena memudahkan identifikasi dan penyatuan massa.

Jika melihat politik aliran, tentu acuan pertama adalah membicarakan aliran politik Islam yang tidak akan pernah lepas dari temuan Clifford Geertz dalam penelitian sosialnya tentang masyarakat Jawa yang menggambarkan dinamika religiusitas masyarakat Jawa secara sederhana menjadi: santri-modernis-tradisionalis, abangan, dan sekuler yang masih berlaku pada kondisi perpolitikan aliran di Indonesia hingga saat ini. Dalam penelitian tersebut, sejak awal Geertz membatasi klasifikasinya penelitian yang dilakukannya di Mojokuto, Jawa Tengah dengan menyatakan bahwa istilah-istilah abangan, santri, dan priyayi menunjukkan dimensi-dimensi variasi kebudayaan, bukan kategori absolut. Penelitian Geertz kerap dikritik, namun ternyata tetap menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya karena selalu saja kelompok aliran Islam di Indonesia terlihat jelas memisah dalam sejumlah Pemilu.

Hasil pengamatan Geertz tersebut diperjelas dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan King (2003) dan Baswedan (2004) terhadap Pemilu tahun 1955 dan Pemilu tahun 1999, yang menunjukkan bahwa hasil pemilu tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda.

Melihat hasil penelitian King dan Baswedan tersebut, penulis tertarik untuk menerapkan pada kondisi politik aliran Katolik sebagai salah satu kelompok religius yang pernah menjadi

peserta Pemilu 1955 melalui Partai Katolik (PK) dan Pemilu 1999 melalui Partai Katolik Demokrat (PKD). Hal ini didorong oleh fakta hasil pemilu saat itu, yang ternyata berbanding terbalik dengan konsistensi politik aliran Islam di Indonesia, dalam dua pemilu tersebut politik aliran Katolik justru cenderung meluntur. Jika faktor religiusitas sebagai identitas sosial di Indonesia begitu penting mengapa tidak berimbas terhadap berimbas terhadap partai-partai berbaju Katolik?

Seiring perjalanan waktu, usai menamatkan pendidikan, peneliti mendapati fakta melunturnya aliran dalam politik yang juga terjadi terhadap sejumlah partai beridentitas Kristen maupun campuran Kristen-Katolik yang menjadi peserta Pemilu pada 1999, 2004 dan 2009. Partai-partai tersebut adalah Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Baik Krisna dan PDKB dalam Pemilu 1999 gagal secemerlang organisasi politik Kristen Protestan yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) di era-1950-an, sementara PDS berhasil tampil cukup mengesankan pada Pemilu 2004, tak ubahnya Parkindo pada Pemilu 1955, dengan meraih banyak kursi di Senayan namun ternyata gagal mengulangnya di Pemilu 2009 bersama Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Apakah ini disebabkan kecenderungan pemilih Kristen-Katolik untuk memberikan suaranya bagi partai nasionalis yang sekular dengan alasan lebih mapan dan berpeluang memperjuangkan kepentingan kaum Kristen-Katolik di tingkat DPR? Atau justru karena hal lain? Secara sederhana pertanyaan peneliti mungkin akan dijawab dengan statistik yang ada bahwa Islam secara kuantitas lebih mayoritas dan merata sementara Kristen Katolik dan Kristen Protestan adalah minoritas di banyak daerah sehingga dinamika politis di kalangan Kristen tersebut kurang terlihat.

Namun penyederhanaan persoalan tidak akan menjawab fenomena yang ada karena dengan perbandingan statistik yang ada perolehan suara Partai Katolik Demokrat pada Pemilu 1999 seharusnya bisa saja lebih besar daripada yang mereka peroleh. Begitu juga dengan partai-partai beridentitas Kristen Protestan yang menjadi mayoritas di beberapa daerah Timur, ternyata pada Pemilu 1999 tak terlalu cemerlang. Bahkan keberhasilan kelompok Kristen Protestan melalui PDS pada Pemilu 2004, pun tidak berhasil diulang dan harus merelakan langkah mereka berakhir pada Pemilu 2009.

Dalam kasus Kristen Katolik pada pemilu 1999, dengan potensi populasi umat Katolik saat

Pemilu pertama pasca Orde Baru mencapai 6.153.973 (sensus nasional 2000) dengan sebagian kecil diantara umat Katolik tersebut menjadi penguasa media dan sejumlah jaringan bisnis besar, Partai Katolik Demokrat (PKD) hanya mendapatkan 216.675 suara atau hanya mendapatkan satu kursi. Jika bercermin pada hasil Pemilu 1955, pencapaian PKD termasuk mengejutkan, mengingat Partai Katolik (PK) sebagai peserta pemilu 1955 dengan potensi umat pada tahun 1955 dan 1960 yang berkisar antara 1.011.461 jiwa, berhasil menempati posisi ke tujuh dengan meraih enam kursi di tingkat DPR (770.740 suara) dan 10 kursi di konstituante (748.591 suara). Sementara pada pemilu 1971, atau pemilu yang digelar usai berakhirnya Orde Lama, Partai Katolik dengan suara terpecah ke Golongan Karya masih mampu meraih tiga kursi DPR (603.740 suara), sebelum kemudian atas keputusan sendiri dan dipaksa pemerintah berfusi dengan partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973.

Hal hampir serupa menimpa Partai beridentitas Kristen di masa Pemilu di masa Habibie. Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) meski bermodal lambang hampir menyerupai Parkindo, ternyata Krisna hanya meraup 369.719 suara sedangkan partai yang merupakan campuran Kristen Protestan dan Kristen Katolik yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) mendapatkan 550.846 suara atau berhak atas lima kursi jika kursi sisa dihitung dengan tanpa memperhatikan suara *stembus accoord* sementara setelah melewati proses voting, atau tiga kursi dengan pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*. Bandingkan dengan Parkindo pada Pemilu 1955 yang meraup 1.003.326 suara (2,66%) dan berhak atas delapan kursi sementara pada Pemilu 1971, serupa kondisi Partai Katolik dengan kemunculan Golkar, Parkindo hanya meraih 733.359 (1,34%) atau 7 kursi.

Jika Krisna bernasib tragis karena gagal total menghantar partainya ke Senayan, maka Partai Katolik Demokrat (PKD) maupun PDKB berhasil menempatkan wakil-wakil mereka di Senayan usai Pemilu 1999, hanya saja umur PKD dan PDKB tak lama. PKD melanjutkan sejarah pembentukannya yang penuh friksi, membuat PKD terpecah belah, sementara PDKB harus bubar di tengah jalan. Lagi-lagi, dengan alasan serupa. Tak lain, tak bukan: berebut kekuasaan!

Kemunculan Partai Damai Sejahtera (PDS) pada Pemilu 2004 cukup mengejutkan. Lahir dari massa Kristen Protestan, PDS berhasil meraup suara cukup mengesankan 2.414.254 (2,13%) atau berhak atas 13 kursi ke Senayan. Namun Pemilu 2009, lagi-lagi akibat konflik internal dan perubahan aturan Pemilu, PDS harus menerima nasib tidak lolos ke Senayan karena hanya meraup 1.541.592 suara (1,48%). Partai Kristen lain, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), meskipun

lolos dari verifikasi KPU untuk bertarung di Pemilu 2009 dengan nomor urut 32, PKDI hanya meraup 325,771 suara (0,31%) alias jauh di bawah ambang batas.

Tentu saja, puncak kenyataan pahit bagi pihak pendukung perlunya partai-partai beridentitas Kristen adalah vonis bahwa PDS akhirnya tidak berhak melangkah menuju Pemilu 2014 akibat gagal melewati proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekaligus menjadi akhir perjalanan partai-partai beridentitas Kristen.

Melihat fakta tersebut, statistik penduduk ternyata bukan satu-satunya faktor utama dari kegagalan kemunculan politik aliran Kristen Protestan maupun Kristen Katolik di Indonesia pada masa reformasi. Bisa jadi ada faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan partai-partai beridentitas salib, burung dara, pohon cemara sepanjang Pemilu 1999-2009 tersebut jika mendasarkan diri terhadap politik aliran Islam yang lebih konsisten. Mengapa partai-partai Kristen di Indonesia tak laku? Apakah penyebabnya serupa kemunduran perolehan suara partai-partai Islam sepanjang 10 tahun terakhir? Apakah benar partai agama semakin tidak menarik pemilih Indonesia? Apakah benar mayoritas pemilik suara lebih suka memberikan aspirasinya kepada partai-partai nasionalis? Atau mungkin terdapat hal-hal lain yang menjadi jawaban di balik mudurnya politik aliran Kristen-Katolik tersebut? Banyak pertanyaan yang muncul.

Padahal jika kita melihat faktor agama, terutama umat Islam dan Kristen dalam tingkat partisipasi pemilih di Indonesia, Mujani, Liddle dan Ambardi (2012) mencatat partisipasi umat Kristen dan Islam dalam pemilu 1999-2009 cukup tinggi. Mengapa? Tak lain karena umat Kristen dan Islam aktif berkumpul dalam kegiatan sosial dan religius sehingga berpeluang bagi mobilisasi politik. Pendek kata mereka mudah digaget secara politik karena terbiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan berada dalam jaringan sosial (*civic engagement*). Tetapi, ternyata agama pemilih maupun identitas keagamaan partai ternyata tidak menjadi poin utama pemilih dalam memilih suatu partai. Setidaknya ini terlihat dalam perolehan suara partai dengan identitas agama sepanjang kurun 1999-2009. Selain itu terdapat dua faktor lain yang membuat partai beridentitas Kristen gagal bertahan. *Pertama*, terjerumus dalam persoalan internal dan gagal menanganinya. *Kedua*, upaya menjadi partai terbuka ternyata justru menjadi faktor yang mendegradasi citra partai Kristen yang terlanjur terbentuk dan mengakibatkan partai Kristen gagal berbicara pada Pemilu selanjutnya.